

**PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS  
MULTIKULTURALISME UNTUK HARMONISASI  
SOSIAL  
(Penerapan Pendekatan Kebudayaan dalam Studi Islam)**

**Mujiyatun<sup>1</sup>**

Email: Mujiyatun@an-nur.ac.id

**Abstract**

*As a nation with a plural society, social harmony is a shared ideal, but the social dynamics that do not prioritize tolerance between communities can cause friction caused by these differences. Therefore the formulation and concept of multiculturalism are needed that can be used to prevent conflicts that can cause disintegration. This concept can be instilled through Islamic education which is synergized with educational institutions. The internalization process is carried out in association between citizens in educational institutions, especially between teachers and students, with an emphasis on understanding religious diversity, diversity in social status, building gender sensitivity, and understanding language and ethnic diversity*

**Keyword:** *Multiculturalism, Islam, education, social harmony*

**A. Pendahuluan**

Selama puluhan tahun Indonesia dikenal atau diklaim sebagai bangsa yang sopan, ramah dan toleran. Dengan beragam agama, etnis, bahasa dan kebudayaan lokal yang demikian kaya, masyarakat Indonesia pada masa-masa pra dan awal kemerdekaan bisa hidup rukun satu sama lain. Tidak terdengar kasus-kasus konflik antar agama maupun etnis yang dipicu semata-mata karena perbedaan latar dan afiliasi kultural dan religius mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu untuk menyongsong kemerdekaan dan tumbuhnya solidaritas kebangsaan.

Di tengah bangsa dan masyarakat yang multikultural-multireligius, persoalan sosialkeagamaan memang bukan

---

<sup>1</sup> Dosen IAI An Nur Lampung

persoalan yang sederhana. Kompleksitas hubungan sosial antarumat beragama ini dirasakan oleh seluruh elemen dalam masyarakat, mulai dari politisi, guru, tokoh agama dan orang tua di rumah. Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi merupakan pekerjaan yang sia-sia. Masing-masing mempunyai hak yang sama, masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendirisendiri dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.

Menurut Amin Abdullah, cara yang paling tepat untuk mempertahankan tradisi dan identitas keagamaan di atas adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, mengawetkan, dan mengonservasi tradisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari abad yang satu ke abad yang lain.<sup>2</sup>

Kondisi masyarakat yang plural baik dari segi budaya, ras, agama, dan status sosial ekonomi cenderung untuk menimbulkan potensi benturan bernuansa SARA termasuk nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia agar peserta didik dapat memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi akibat perbedaan dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia dan tidak jarang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik dapat berpotensi mengancam persatuan, kesatuan, serta keutuhan bangsa. Walaupun konflik itu akan selalu terjadi, karena merupakan realitas permanen dalam perubahan suatu kehidupan, akan tetapi konflik tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian perlu digulirkan paradigma baru baik melalui sistem politik yang mampu

---

<sup>2</sup> M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), 2.

mengendalikan konflik maupun melalui jalur pendidikan yang mampu mengayomi dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membedakan latar belakang mereka.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Berbicara tentang pengertian pendidikan Islam, para ahli Pendidikan Islam berbeda pendapat tentang asal kata Pendidikan Islam. Dalam hal ini, ada tiga term yang berkaitan langsung dengan Pendidikan Islam, yakni tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Secara singkat, istilah tarbiyah berasal dari akar kata rabb, yang dapat diartikan dengan tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur dan menjaga kelestarian atas eksistensinya.<sup>3</sup> Sedangkan istilah ta'lim berasal dari akar kata allama yang berarti mengajarkan. Istilah *ta'dib* sendiri berasal dari akar kata *addaba* yang berarti mendidik. Dari ketiga term tersebut, dapat kita pahami bahwa hakekat Pendidikan Islam adalah menjadikan manusia menjadi lebih baik. Baik itu melalui proses mengembangkan, merawat, mengatur, mendidik, mengajar dan sebagainya. Hal ini sangat wajar, mengingat Islam diturunkan ke dunia ini untuk di jadikan pedoman hidup manusia, supaya manusia selamat di dunia dan akherat. Sehingga untuk mampu merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan seperangkat proses sistemik yang kemudian disebut pendidikan.

Secara terminologi, Pendidikan Islam mempunyai banyak definisi, sesuai dengan sudut pandang dan subyektifitas yang mendefinisikannya. Berikut ini beberapa definisi Pendidikan Islam menurut para ahli:

#### **a. Al Ghazali.**

Pendidikan Islam menurut Al Ghazali merupakan ibadah dan upaya meningkatkan kualitas diri. Selain itu, harus mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat.<sup>4</sup>

#### **b. Ahmad Tafsir**

---

<sup>3</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 26.

<sup>4</sup> Ibid, 187.

Tafsir mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

c. Samsul Nizar

Menurut Nizar Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam.<sup>6</sup>

d. Achmadi

Menurutnya Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah suasana ideal yang ingin diwujudkan. Dalam Pendidikan Islam, suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir. Tujuan akhir, biasanya dirumuskan secara padat dan singkat, seperti kedewasaan, insan kamil, manusia seutuhnya atau kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Pencapaian suasana ideal tersebut tidak hanya merujuk pada tujuan akhir saja, karena tujuan tersebut terlalu ideal dan belum memberikan suatu gambaran makna yang jelas, sangat normatif dan tidak operatif. Sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci ke dalam bagian-bagian tertentu. Penjabaran tersebut sering disebut dengan tujuan khusus.

Menurut Hery Nor Aly dan Mundir Suparta, tujuan Pendidikan Islam dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, Pendidikan Islam adalah mendidik individu mukmin agar tunduk, bertaqwa dan beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan Islam adalah sebagai berikut. (a) Mendidik

---

<sup>5</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 32.

<sup>6</sup> Ibid., 32.

<sup>7</sup> Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 29.

individu yang saleh dengan memperhatikan segenap dimensi perkembangannya: rohani, emosional, sosial, intelektual dan fisik. (b) Mendidik anggota sosial yang saleh, baik dalam keluarga maupun masyarakat muslim. (c) Mendidik manusia yang saleh bagi masyarakat yang besar.

Ahmad Tafsir mengklasifikasikan tujuan pendidikan Islam menjadi tiga kategori, yaitu: (a) Tujuan yang berkaitan dengan individu, jasmani, dan rohani serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat. (b) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat dan pengkayaan pengalaman masyarakat. (c) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai aktifitas di antara aktifitas-aktifitas masyarakat. 9

Sementara Samsul Nizar menekankan bahwa tujuan Pendidikan Islam harus mencakup dua hal: Pertama dimensi dialektika horisontal, yakni mampu mampu mengembangkan realitas kehidupan, baik yang menyangkut dengan dirinya, masyarakat maupun alam semesta beserta isinya. Kedua, dimensi ketertundukan vertikal, yakni mengisyaratkan selain sebagai alat untuk memelihara, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alami, juga hendaknya menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam upaya mencapai hubungan yang abadi dengan kholiqnya. 10

Lebih lengkap, Zakiyah Darajat membagi tujuan pendidikan Islam menjadi empat tujuan, yakni tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara dan tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran maupun yang lainnya, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan maupun pandangan. Dalam hal ini tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan dengan tujuan nasional negara di mana Pendidikan Islam dilaksanakan, serta lembaga penyelenggara Pendidikan Islam yang bersangkutan. Tujuan ini dapat dicapai melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan,

penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. 11 Tujuan akhir adalah tujuan yang akan tercapai ketika masa hidup di dunia ini telah berakhir. Artinya, tujuan ini dapat dilihat, bagaimana keadaan peserta didik ketika meninggal dunia. Dalam hal ini tujuan akhir Pendidikan Islam adalah insan kamil yang mati dan menghadap Allah dalam keadaan taqwa dan muslim. Tujuan sementara mengandung arti tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan sementara Pendidikan Islam adalah terbangunnya insan kamil yang bertaqwa dalam semua tingkatan Pendidikan Islam.

### **3. Konsep Multikulturalisme**

Pengertian multikulturalisme diberikan oleh para ahli sangat beragam, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Menurut longer oxford directionary istilah “multiculturalisme” merupakan deviasi kata multicultural kamus ini meyetir dari surat kabar di Kanada, Montreal times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multicultural dan multilingual. (Muhaemin el-Ma’had, Multikulturalisme dan Pendidikan Multikulturalisme).<sup>9</sup>

kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Dua istilah ini kadang-kadang disejajarkan dengan istilah multikultur (budaya yang beragam). Istilah multikultur atau multikultural awalnya merujuk pada istilah multikulturalism, yang dalam konteks negara Kanada (dimana istilah ini pertama kali diperkenalkan) digunakan sebagai sinonim dari kata pluralism. Istilah masyarakat multikultural pertama kali di Kanada sekitar tahun 1950-an, Amerika Serikat (AS) sendiri

---

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, (Jakarta: FE UI, 2007), 85.

<sup>9</sup> Ibid

lebih menggunakan sebutan *melting post society* untuk menyebutkan masyarakatnya yang majemuk, sedangkan India menggunakan ungkapan *composite society*, sedangkan Indonesia sendiri memperkenalkan slogan *Bhinneka Tunggal Ika*, untuk menunjukkan keragaman suku, agama dan ras di Indonesia.<sup>10</sup> H. A. R. Tilaar, mengatakan, dalam pengertian tradisional tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama; pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*). Kedua, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Dalam gelombang pertama multikulturalisme yang esensi terhadap perjuangan kelakuan budaya yang berbeda (*the other*).<sup>11</sup> Merujuk pendapat para pakar sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa multikulturalisme adalah suatu pemahaman akan penerimaan adanya kemajemukan dalam masyarakat sehingga terhindar konflik horizontal di tengah masyarakat.

#### 4. Pendidikan Islam berbasis Multikulturalisme

Multikulturalisme secara bahasa istilah ini berasal dari kata kebudayaan. Secara etimologis multikulturalisme tersusun dari kata *multi* yang berarti banyak, *kultur* yang berarti budaya, dan *isme* yang memiliki arti aliran atau faham. Dalam kata tersebut terdapat makna pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kehidupan masing-masing yang unik.<sup>12</sup>

Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Smail SM, Abdul Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 127

<sup>11</sup> Tilaar, H. A. R, *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grassindo, 2002), 115-120.

<sup>12</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 75

<sup>13</sup> Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, hlm. 1

Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Istilah “multibudaya” (multiculture) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California.<sup>14</sup> Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.<sup>15</sup>

Pada umumnya, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari penggilan agamanya.<sup>16</sup>

Sebenarnya akar timbulnya berbagai konflik sosial yang mem-buahkan anarki yang berkepanjangan, seringkali memang tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi dalam kenyataannya agama selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai konflik sosial tersebut.

Potensi konflik dan disintegrasi tersebut disebabkan karena agama dalam manifestasinya bersifat ambivalen terhadap persatuan dan kesatuan. Artinya, meskipun agama memiliki

---

<sup>14</sup> James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), 164

<sup>15</sup> Will Kymlicka, “Mitsunderstanding Nationalism” dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), hlm 24

<sup>16</sup> Musa Asy’arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, <http://www2.kompas.com/kompascetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.



kekuatan pemersatu, agama juga mempunyai kekuatan pemecah belah. Ada beberapa alasan menurut Din Syamsuddin mengapa agama memiliki ambivalensi seperti itu, salah satunya adalah agama memiliki kecenderungan absolutistik yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya muncul rejeksionis yaitu penolakan terhadap kebenaran agama lain<sup>17</sup> yang dianggap berbeda dari dan berlawanan dengan yang lain. Akar konflik keagamaan seperti ini kata Arthur D'Adamo karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sendiri.<sup>18</sup> Sehingga yang lebih mencuat ke permukaan bukannya esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan semangat untuk menegasikan yang lain.

Disebabkan oleh truth claim itulah, maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Namun ketika agama-agama itu hadir secara historis, ia berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks inilah pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme<sup>19</sup> sebagai syarat mutlak bagi para penganut agama apapun.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar

---

<sup>17</sup> M. Din Syamsuddin, "Mengelola Pluralitas Agama" dalam Jawa Pos, (12 Mei 1996), 4-5. 47B

<sup>18</sup> Budhy Munawar Rachman, "pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), xxiv-xxvii

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid, "Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsepsi dan aktualisasi)" dalam HAM dan Pluralisme Agama, (Surabaya: PKSK, 1997), 71.

dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barang tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Karena pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia.

Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagamaan Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk bahkan telah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Kondisi demikian merupakan suatu kewajaran lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah beberapa agama yang telah ada sebelumnya. Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim.<sup>20</sup> Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham religius plurality. Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam,<sup>21</sup> namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.<sup>22</sup> Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar bisa

---

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hlm. 102

<sup>21</sup> QS. Âli Imrân : 13.

<sup>22</sup> QS. al-Baqarah : 256.

melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat al-Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (kalimat sawâ') antara semuanya.<sup>23</sup> Kalaupun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan itu berbeda-beda dapat dipastikan bahwa eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi kemanusiaan tentu sama.

Ajaran tauhid dalam Islam mengandung pengertian adanya suatu orde yang satu sekaligus menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat hukum abadi yang universal. Menurut Marcel A. Boisard,<sup>24</sup> hukum yang abadi dan berlaku secara universal adalah berawal dari suatu keyakinan bahwa manusia adalah satu dan tercipta karena kehendak yang satu, yaitu Tuhan pencipta alam. Kesadaran demikian hanya bisa tumbuh pada manusia yang menyadari prinsip-prinsip moral yang dapat mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebajikan universal.

Implikasi dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu yaitu Tuhan, berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh manusia adalah bersaudara karena sama-sama makhluk Tuhan. Adanya persamaan keyakinan samasama makhluk Tuhan dan rasa persaudaraan tersebut menurut Harun Nasution bisa menjadi landasan toleransi.<sup>25</sup> Adanya keyakinan itu mengasumsikan bahwa ciptaan-Nya juga pada hakikatnya adalah suatu kesatuan. Pandangan ini membawa pada kesimpulan bahwa seluruh jagad raya (universe) termasuk di dalamnya seluruh umat manusia apapun bangsa dan bahasanya adalah merupakan makhluk Tuhan juga, meskipun agama dan keyakinannya berbeda.

Seorang agamawan memang dituntut untuk mempunyai sikap yang "lebih" realistik ketika berhadapan dengan realitas empirik kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik,

---

<sup>23</sup> QS. Âli 'Imrân : 64.

<sup>24</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 184.

<sup>25</sup> *Ibid.*

terutama dalam memposisikan agama. Seperti dikemukakan oleh Hans Kung bahwa kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam.<sup>26</sup> Pertama, dari

luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini mempunyai satu tujuan yaitu keselamatan (dengan konsep berbedabeda) dengan jalan berbeda-beda. Lewat perbedaan ini, agama-agama bisa memperkaya satu sama lain. Kedua, dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut.

Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etik yang fundamental yang dimiliki oleh peserta didik dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama satu dengan lainnya sekaligus dapat menjadi entri point untuk mencari titik temu atau dalam terminologi al-Qur'an disebut kalimat sawâ'.

Bertolak dari pandangan ini, dimungkinkan bahwa Islam dapat menjadi pijakan bagi pendidikan multikultural tersebut. Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu cara strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

##### **5. Implementasi pendidikan Islam multikulturalisme untuk harmonisasi sosial**

Kata "Harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Harmonia" yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Dalam arti filsafat, harmonisasi diartikan sebagai "kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur". Istilah

---

<sup>26</sup> ST. Sunardi, *Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Kung Bagi Dialog Antar Agama* dalam Seri DIAN I Dialog, Kritik dan Identitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan DIAN, 1994), 66-67.

harmonisasi secara etimologis meunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>27</sup>), kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan<sup>28</sup>. Harmoni dalam konteks hakikat merujuk pada adanya keserasian, kehangatan, keterpaduan dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus.<sup>29</sup>

*Social harmony is an integrative value in a global, information society, which unites in itself love, peace, justice, freedom, equality, brotherhood, cooperation, nonviolence, tolerance, humanism and other universal values, and prioritizes children. Harmony is the top value of oriental culture (Confucianism, Buddhism, etc. ) but it did not become a priority value for industrial society. At the same time it is not alien to western culture (Pythagoras, Plato, Aristotle, Renaissance, Leibniz, etc. ). Therefore, harmony is a common value for western and eastern cultures, and can eliminate the clash of civilizations. Social harmony creates a harmonious and sustainable peace, beyond wars, terror and poverty. Harmonious peace (social harmony) begins with harmony of genders (mothers and fathers), and generations (parents and children), and continues in the population with harmony of sphere classes, through harmonious partnership.*

---

<sup>27</sup> Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. " Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Departemen Pendidikan Nasional (2012), 484.

<sup>28</sup> Kusnu Goesniadhie, S. *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex specialis suatu masalah*. (JP Books, 2006), 59.

<sup>29</sup> Roqib, Moh, and Abdul Wachid, *Harmoni dalam budaya Jawa: dimensi edukasi dan keadilan gender*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2007), 2.

Dari penjelasan Semaskho, bahwa harmonisasi merupakan susunan cinta, damai, keadilan, humanisme dan nilai-nilai lainnya. Artinya sebuah harmonisasi akan terwujud dengan baik jika semua nilai saling melengkapi. Sehingga akan menghasilkan sebuah konsep harmonisasi sosial yang implemtasinya akan terlihat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks mewujudkan harmonisasi sosial melalui pendidikan Islam multikulturalisme, mengacu pada konsep multukulturalisme yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

**a. Memahami Keragaman Agama**

Berbagai macam benturan dan konflik antar agama yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, disinyalir karena faktor eksklusifisme beragama. Paradigma eksklusif memandang bahwa hanya agamanya lah yang paling benar, sehingga menganggap agama lain salah dan sesat. Biasanya, cara pemahaman terhadap ajaran agama paradigma ini, lebih bersifat tekstual dan normatif.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun paradigma keberagaman inklusif kepada peserta didik di lembaga Pendidikan Islam atau sekolah. Sekolah sebagai wahana pembelajaran mempunyai peran penting dalam membangun keberagaman inklusif ini. Karena sekolah diyakini sebagai proses pembentukan jati diri peserta didik dan cara pandang dalam kehidupannya. Dalam hal ini, beberapa langkah-langkah untuk membangun lingkungan sekolah yang pluralis dan toleran terhadap semua pemeluk agama, yaitu: (1) Sekolah membuat dan menerapkan aturan-aturan lokal, yakni aturan yang hanya khusus diterapkan di sekolah tersebut. Poin utama yang harus dicantumkan dalam aturan tesebut adalah pelarangan segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut. Harapannya adalah, supaya semua unsur yang ada di sekolah tersebut dapat menghargai orang lain yang berbeda agama. (2) Berperan aktif menggalakkan dialog antar agama. Hal ini dimungkinkan untuk membangun rasa saling pengertian, sejak dini antara siswa-siswa yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Yang pada akhirnya akan terjadi dialog dan komunikasi antar mereka yang berbeda agama. (3) Menyediakan dan menerapkan buku-buku

yang heterogen, yang mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa yang berbeda agama.

**b. Memahami keragaman bahasa**

Diskriminasi bahasa, seringkali terjadi dalam masyarakat. Masyarakat menilai bahwa ada semacam “stratifikasi” bahasa di masyarakat. Sebagai contoh ada yang menganggap bahwa bahasa Jawa (khususnya Banyumasan) itu terkesan kasar dan rendah. Dan yang harus dipahami bahwa setiap masyarakat pengguna bahasa akan selalu menilai bahwa bahasanya adalah yang paling baik dan tinggi.

**c. Membangun Sensitivitas Gender**

Bias gender sampai sekarang masih mewarnai kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, perempuanlah yang menjadi objek bias tersebut. Subordinasi terhadap perempuan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan menjadi fenomena gunung es, yang tampak kecil di permukaan. Di sinilah tantangan terhadap Pendidikan Islam untuk melakukan upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Membangun sensitivitas gender adalah upaya real untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut. Lembaga pendidikan Islam sebagai manifestasi dari proses pendidikan Islam, dituntut untuk mampu melakukan transformasi nilai menuju kesetaraan gender.

Dalam hal ini, lembaga Pendidikan Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Mempunyai dan menerapkan peraturan sekolah yang melarang adanya diskriminasi gender. (2) Lembaga pendidikan Islam harus berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender, terhadap semua unsur yang ada di sekolah tersebut, baik guru, murid, pegawai staf administrasi. Hal ini dimaksudkan agar penanaman nilai-nilai tentang persamaan hak, serta sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan efektif (3) Mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kesetaraan gender.

**d. Memahami keragaman status sosial**

Keragaman status sosial di masyarakat, biasanya diiringi dengan perilaku yang tidak adil. Di satu sisi, masyarakat menghormati dan memberikan tempat yang lebih kepada seseorang yang mempunyai jabatan tinggi. Sebaliknya, orang

yang miskin sering kali dipandang sebelah mata. Demikian juga di lingkungan sekolah, guru sering kali berlaku tidak adil kepada peserta didik, karena status sosial yang dimiliki orang tua peserta didik tersebut. Pendidikan Islam yang visi keadilan.

#### **e. Memahami keragaman etnis**

Keragaman etnis yang sangat majemuk di Indonesia, adalah tantangan kerukunan masyarakat. Terbukti, akhirakhir ini konflik dan kerusuhan yang bertemakan etnis muncul kembali. Sehingga perlu dibangun pemahaman bersama tentang keragaman etnis. Pendidikan Islam juga tidak bisa menutup mata atas hal ini. Pendidikan Islam harus memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat akan keberagaman etnis.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian lembaga pendidikan Islam, kaitannya dengan pembangunan kesadaran multietnis adalah: (1) Membuat dan memberlakukan peraturan sekolah tentang pelarangan diskriminasi dan saling merendahkan antar etnis. Sekolah tidak boleh membedakan latar belakang etnis peserta didik. (2) Berperan aktif dalam membangun pemahaman dan kesadaran peserta didik akan keragaman etnis. Misalnya, dengan mengadakan kajian dan dialog antar etnis, yang diharapkan akan mampu menjalin hubungan yang harmonis antar siswa yang berbeda etnis (3) Memberikan pelatihan, untuk memahami keragaman etnis, dan bersikap adil, anti diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu

#### **Penutup**

Pendidikan apapun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang sangat beragam dan multidimensional. Karena itu untuk mengatasi problem disintegrasi yang disebabkan oleh adanya karakteristik masyarakat yang sangat plural, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, yakni multikulturalisme. Pendekatan



multikulturalisme dalam semangat keagamaan yang ditransfer melalui media pendidikan, pada akhirnya akan membentuk tatanan sosial yang harmoni.

### **Daftar pustaka**

Ahmadi. *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Azra, Azyumardi. *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2007.

Banks, James. *Teaching Strategies For Ethnic Studies*. Newton: Allyn and Bacon, 1998.

Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Ismail, S. M. , and Abdul Mukti. *pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Kymlicka, Will. *Mitsunderstanding Nationalism"* dalam *Theorizing Nationalism*, diedit oleh R. Beiner, Albany: State University of New York, 1999.

Madjid, Nurcholish. *Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama, dan Integrasi Nasional (konsepsi dan aktualisasi)" dalam HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: PKSK, 1997.

Mahfud, Chaerol. *Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Ciputat Pers, 2002.

Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002

- Rachman, Budhy Munawar. "pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya, 1992.
- Tilaar, Henry Alexis Rudolf, and Suratina Dhian Hapsari. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2004.
- Indonesia. go. id, "Suku Bangsa", <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> (diakses pada 6 november 2019)
- Musa Asy'arie, Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa, <http://www2.kompas.com/kompascetak/0409/03/opini/12465.htm>. 2004.